PERLINDUNGAN HAK WARGA NEGARA DALAM REGULASI PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS PERSPEKTIF *FIQH SIYĀSAH DUSTŪRIYYAH*

SKRIPSI

Oleh

Aufa Maulida Zakiyah

NIM. 05020422025

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fakultas Syariah Dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Hukum Tata Negara

Surabaya

2026

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Aufa Maulida Zakiyah
NIM	:	05020422025
Fakultas/Prodi	:	Syariah dan Hukum/ Hukum Tata Negara (Siyasah)
Judul	:	Perlindungan Hak Warga Negara dalam Regulasi Program Makan Bergizi Gratis Perspektif *Fiqh Siyāsah Dustūriyyah*

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian dan karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya sesuai kaidah penulisan karya ilmiah. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini adalah hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 12 Juni 2026

Yang menyatakan,



Aufa Maulida Zakiyah

NIM. 05020422025

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Aufa Maulida Zakiyah

NIM : 05020422025

Judul : Analisis Fikih Siyasah Dusturiyah Terhadap Program Makan Bergizi Gratis

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan pada sidang munaqasah skripsi.

Surabaya, 12 Mei 2026

Pembimbing,

Drs. Jeje Abdul Rojak, M.Ag.

NIP. 196310151991031003

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Aufa Maulida Zakiyah

NIM. : 05020422025

Judul : Perlindungan Hak Warga Negara dalam Regulasi Program Makan Bergizi Gratis Perspektif *Fiqh Siyāsah Dustūriyyah*

Telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi pada Hari Selasa, Tanggal 02 Juni 2026, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I

Drs. Jeje Abdul Rojak, M.Ag.
NIP. 196310151991031003

Penguji II

Prof. Dr. Titik Triwulan Tutik, S.H., MH.
NIP.196803292000032001

Penguji III

Ikhsan Fatah Yasin, S.H.I., M.H.
NIP. 198905172015031006

Penguji IV

Moh. Bagus, M.H.
NIP. 199511052022031001

Surabaya, 08 Juli 2026

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,

Dr. Hj. Sukron Musafa'ah, M.Ag.
NIP. 196303271999032001

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Aufa Maulida Zakiyah
NIM : 05020422025
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Jurusan Hukum Publik Islam/Hukum Tata Negara
E-mail address : Zakiyahmaulida304@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☑ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Perlindungan Hak Warga Negara Dalam Regulasi Program Makan Bergizi Gratis Perspektif *Fiqh Siyāsah Dustūriyyah*

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 28 Oktober 2026
Penulis

(Aufa Maulida Zakiyah)

http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

ABSTRAK

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai program prioritas nasional menghadapi tujuh permasalahan serius yang menyentuh dimensi perlindungan hak warga negara, yakni: ketidaktepatan sasaran, lemahnya kualitas dan keamanan pangan yang mengakibatkan lebih dari 11.640 kasus keracunan sepanjang 2025, kendala distribusi dan logistik, kerentanan ketersediaan anggaran, pengawasan tanpa daya paksa, kecukupan gizi yang belum terintegrasi dengan sistem kesehatan, serta sentralisasi koordinasi yang mereduksi peran pemerintah daerah. Permasalahan-permasalahan ini mencerminkan bahwa regulasi MBG belum sepenuhnya memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi warga negara sebagai penerima manfaat. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini merumuskan dua pertanyaan: bagaimana perlindungan hak warga negara dalam regulasi Program Makan Bergizi Gratis ditinjau dari sistem hukum tata negara Indonesia, dan bagaimana perspektif *fiqh siyăsah dustũriyyah* terhadap perlindungan hak warga negara dalam regulasi Program Makan Bergizi Gratis.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif-analitis dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan komparatif. Sumber hukum primer meliputi UUD 1945, UU Nomor 8 Tahun 1999, UU Nomor 18 Tahun 2012, UU Nomor 17 Tahun 2023, Perpres Nomor 72 Tahun 2021, Perpres Nomor 83 Tahun 2024, dan Perpres Nomor 115 Tahun 2025. Analisis menggunakan teori perlindungan hukum, *fiqh siyăsah dustũriyyah* melalui tiga konsep kewajiban pemerintah yakni *riayat ar-ra'iyyah, ummah,* dan *takaful al-ijtimä'î,* serta teori *welfare state* sebagai pendukung.

Hasil penelitian menunjukkan dua temuan. Pertama, regulasi MBG sudah memadai secara teknis-operasional dan konstitusional, namun menyimpan celah substantif berupa ketiadaan jaminan hak penerima manfaat yang eksplisit, pengawasan tanpa sanksi mengikat, sentralisasi kewenangan pada BGN, serta ketiadaan standar gizi komprehensif termasuk pembatasan UPF. Kedua, dalam perspektif *fiqh siyăsah dustũriyyah*, orientasi program pada kemaslahatan kelompok rentan dapat diapresiasi dari perspektif *riayat ar-ra'iyyah,* namun regulasi belum memenuhi standar *riayat ar-ra'iyyah* dalam perlindungan hak konkret, belum memenuhi prinsip *ummah* dalam ketepatan sasaran dan partisipasi bermakna, serta belum memenuhi standar *takaful al-ijtimä'î* dalam kecukupan, keberlanjutan, dan efektivitas pengawasan.

Penelitian ini merekomendasikan kepada pemerintah dan BGN untuk merevisi regulasi tata kelola penyelenggaraan program MBG yang ada guna mengakomodasi jaminan hak penerima manfaat secara eksplisit, penguatan sanksi pengawasan, standar gizi komprehensif, serta kewenangan proporsional bagi

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

pemerintah daerah. Kemudian kepada DPR, penelitian ini meminta untuk mendorong adanya partisipasi publik secara bermakna dalam revisi regulasi MBG.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN ..... **iii**
PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... **iv**
PENGESAHAN ..... **v**
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI ..... **vi**
ABSTRAK ..... **vii**
KATA PENGANTAR ..... **ix**
DAFTAR ISI ..... **xii**
DAFTAR TABEL ..... **xiv**
DAFTAR TRANSLITERASI ..... **xv**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang 1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah 11
C. Rumusan Masalah 12
D. Tujuan Penelitian 13
E. Manfaat Penelitian 13
F. Penelitian Terdahulu 14
G. Landasan Teori 17
H. Definisi Operasional 22
I. Metode Penelitian 24
J. Sistematika Pembahasan 26
BAB II LANDASAN TEORI PERLINDUNGAN HUKUM, *FIQH SIYĂSAH DUSTŪRIYYAH*, DAN *WELFARE STATE* SEBAGAI KERANGKA ANALISIS PERLINDUNGAN HAK WARGA NEGARA **23**
A. Teori Perlindungan Hukum 23
1. Hakikat Perlindungan Hukum 23
2. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum 25
3. Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagai Parameter Perlindungan Hukum 27
4. Unsur-Unsur Negara Hukum sebagai Parameter Konstitusionalitas 28
B. Teori *Fiqh Siyăsah Dustūriyyah* 30
1. Pengertian dan Ruang Lingkup 30

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A
http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

2. Konsep *Riayat ar-Ra'iyyah* 32
3. Konsep *Ummah* 36
4. Konsep *Takaful al-Ijtimä'î* 38
C. Teori *Welfare state* 41
1. Pengertian dan Prinsip Dasar 41
2. *Welfare state* dalam Perspektif Komparatif Model Jerman 42
3. Akuntabilitas dan Koordinasi Lintas Lembaga dalam Negara Kesejahteraan 43
BAB III PERLINDUNGAN HAK WARGA NEGARA DALAM REGULASI PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS 45
A. Landasan Konstitusional Program Makan Bergizi Gratis dan Konstitusionalitas Regulasinya 45
B. Koordinasi Antar Lembaga dalam Regulasi Program Makan Bergizi Gratis 49
C. Standarisasi Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di Seluruh Wilayah Indonesia 55
D. Mekanisme Pengawasan dan Akuntabilitas dalam Regulasi Program Makan Bergizi Gratis 60
E. Simpulan Analisis 65
BAB IV PERLINDUNGAN HAK WARGA NEGARA DALAM REGULASI PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS PERSPEKTIF *FIQH SIYĂSAH DUSTŨRIYYAH* 67
A. Program Makan Bergizi Gratis dalam Perspektif *Riayat ar-Ra'iyyah* 67
B. Program Makan Bergizi Gratis dalam Perspektif *Ummah* 78
C. Program MBG dalam Perspektif *Takaful al-Ijtimä'î* 84
BAB V PENUTUP 93
A. Kesimpulan 93
B. Saran 94
DAFTAR PUSTAKA 96
LAMPIRAN 101
BIOGRAFI PENULIS 109

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Kesenjangan antara Regulasi terkait Program Makan Bergizi Gratis dengan Implementasinya..... 6

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

DAFTAR PUSTAKA

i. Buku

Abaib, Ali. *Ilmu Hukum Dalam Sampul Siyasah Dusturiyah*. Semesta Aksara, 2019.

Abdul Rojak, Jeje. *Hukum Tata Negara Islam*. UIN Sunan Ampel Press, 2014.

Djazuli, Ahmad. *Fikih Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah*. Jakarta: Kencana, 2003.

Fatmawati. *Fikih Siyasah*. Gowa: Pusaka Aimaida, 2015.

Ghazali, Imam al-. *At-Tibr Al-Masbuk Fi Nashihat al-Muluk*. Beirut: Darul Kutub Ilmiyah, 1988.

Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyăsah*. Jakarta: Premadamedia Group, 2014.

Mahmud Marzuki, Peter. *Penelitian Hukum*. 1st ed. Jakarta: Prenada Media Group, 2005.

Nawawi, Imam. *Al-Minhaj Fi Syarh Shahih Muslim Bin al-Hajjaj*. Vol. 18. Mesir: Darul Hadis, n.d.

Petring, Alexander. *Negara Kesejahteraan Dan Sosial Demokrasi*. Jakarta: Friedrich-Ebert-Stiftung Kantor Perwakilan Indonesia, 2009.

Pulungan, Suyuthi. *Fikih Siyasah: Ajaran, Sejarah, Dan Pemikiran*. 2nd ed. Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2019.

Solapari, Nuryati, Anik Iftitah, Ady Purwoto, and Kurniawan. *Pengantar Ilmu Hukum*. Banten: PT Sada Kurnia Pustaka, 2023.

Tutik, Triwulan Titik. *Hukum Tata Usaha Negara Dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*. 2011; Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2016.

Tutik, Triwulan Titik. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Prestasi Pustaka Raya, 2006.

ii. Jurnal/Skripsi

Adam Ibrahim, Faisol Mahmoud, and Moh Aziz Arifin. "The Quran And Positive Law: A Philosophical Review In A Normative Legal Perspective." Klausula (Jurnal Hukum Tata Negara, Hukum Adminitrasi, Pidana Dan Perdata) 4, no. 1 (May 2025): 32. https://doi.org/10.32503/klausula.v4i1.7036.

http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

Alfin, Aidil. Konsep Jaminan Sosial Dalam Sistem Ekonomi Islam (Analisis Terhadap Istilah Takaful al-Ljtimä'î, Damän al-Ijtima'î Dan Ta'min al-Ijtima'i). 12 (2018).

Al-Rousan, Mohammad Ali, and Tareq Mohammad Al-Azzam. "The Social Welfare in the Succession of Omar Bin Al-Khattab (A Histological Approach)." International Journal of Humanities and Social Science 10, no. 1 (January 2020). https://doi.org/10.30845/ijhss.v10n1a12.

"Al-Siyasah Al-Syar'iyyah 'Inda Ibn Taimiyah (Politik Islam Ibnu Taimiyah)." Al-Ittihad Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam 2, no. 2 (2015).

Amin, Muhammad, and Maula Sari. "Perlindungan Hak Warga Negara dalam Perspektif Al-Qur'an dan Konstitusi." TAFSE: Journal of Qur'anic Studies 8, no. 1 (June 2023): 19. https://doi.org/10.22373/tafse.v8i1.17512.

Amril, Amril, and Hasan Sazali. "Formulasi Regulasi Dan Kebijakan Komunikasi Dalam Pelaksanaan Program Pembangunan: Studi Pada Program Makan Bergizi Gratis." Jurnal Indonesia: Manajemen Informatika Dan Komunikasi 6, no. 3 (September 2025): 1670–79. https://doi.org/10.63447/jimik.v6i3.1566.

Arma Nurlailiy, Nyi Ayu, and Lalu Hendri Nuriskandar. "Peran Ombudsman Dalam Menjaga Good Governance Di Indonesia: Analisis Dari Perspektif Hukum Tata Negara." Al-Muqaronah: Jurnal Perbandingan Mazhab Dan Hukum 3, no. 1 (June 2024): 74–98. https://doi.org/10.59259/am.v3i1.169.

Auliawan, Althaf Gauhar, and Windy Harsiwi. "Kyushoku di Jepang Sebagai Referensi Program Makan Bergizi Gratis di Indonesia." Kiryoku 9, no. 1 (2025): 184–97.

Budiman Basarah and Ulfia Hasanah. "Politik Hukum Dalam Reformasi Regulasi Di Indonesia: (Antara Kepentingan Politik Dan Kepentingan Elit)." Riau Law Journal 8, no. 2 (July 2025): 148–61. https://doi.org/10.30652/rlj.8.2.148-161.

Choudhary, Tarun Shankar, Sarmila Mazumder, Sunita Taneja, Ranadip Chowdhury, Ravi Prakash Upadhyay, Sitanshi Sharma, Neeta Dhabhai, Ole Frithjof Norheim, Nita Bhandari, and Kjell Arne Johansson. "Benefit–Cost Analysis of an Integrated Package of Interventions during Preconception, Pregnancy and Early Childhood in India." BMJ Global Health 10, no. 4 (April 2025): e013659. https://doi.org/10.1136/bmjgh-2023-013659.

Faqih, Muhammad. Konsep Ummah Dan Rakyat Dalam Pandangan Islam. 24, no. 1 (n.d.).

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

Fitriyani, Abd. Basir, and Abdul Rouf Fansyuri. "Konsep-Konsep Negara Dalam Fiqih Siyasah." Farabi 19, no. 1 (2022).

Iqbal Hafizon, Muhammad, Fachrial Kautsar, Deyo Alfa Christian, and Deni Frayoga. "Rekomendasi CISDI Untuk Mengintegrasikan Program Makan Bergizi Gratis Dengan Sistem Kesehatan." Cisdi, 2025.

Jamilah, Jamilah, Meri Listiani, Dina Adhaini, and Syamsiah Syamsiah. "Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia Di Indonesia." Aksioma : Jurnal Sains Ekonomi Dan Edukasi 2, no. 5 (May 2025): 898–912. https://doi.org/10.62335/aksioma.v2i5.1198.

Maylani, Uyla, Damai Vistiani Gulo, and Farhan Lutfhi Azidan. "Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Di Indonesia." Pledoi (Jurnal Hukum Dan Keadilan) 1, no. 1 (September 2022): 12–18. https://doi.org/10.56721/pledoi.v1i1.27.

Muhajir. "Pemikiran Politik Islam Imam Al-Mawardi Dan Relevansinya Di Indonesia." POLITICA: Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam 10, no. 1 (2023): 83–98.

Muslim. Al-Zuhd Wa al-Raqaiq. Al-Nahyu 'an al-Madhi. Al-Jami' al-Saheeh, n.d.

Rangkuti, Irvino. "Kajian Norma Pancasila Terhadap Penerapan Sanksi Pidana Mati Dalam Hukum Positif Di Indonesia." Res Nullius Law Journal 5, no. 1 (January 2023): 47–59. https://doi.org/10.34010/rnlj.v5i1.8727.

Said, Muh. "Pemikiran Ibn Hazm Tentang Al-Takaful AL-Ijtima'i Sebagai Sarana Kesejahteraan Ekonomi." Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman 21, no. 2 (2022): 123–37.

Scott, Ian, and Ting Gong. "Coordinating Government Silos: Challenges and Opportunities." Global Public Policy and Governance 1, no. 1 (March 2021): 20–38. https://doi.org/10.1007/s43508-021-00004-z.

Suriadi, Hari, Aldri Frinaldi, Lince Magriasti, and Lara Yandri. "Desentralisasi Dan Upaya Peningkatan Otonomi Daerah: Menuju Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia." Menara Ilmu 18, no. 1 (January 2024). https://doi.org/10.31869/mi.v18i1.4869.

Verguet, Stéphane, Paulina Limasalle, Averi Chakrabarti, Arif Husain, Carmen Burbano, Lesley Drake, and Donald A. P. Bundy. "The Broader Economic Value of School Feeding Programs in Low- and Middle-Income Countries: Estimating the Multi-Sectoral Returns to Public Health, Human Capital, Social Protection, and the Local Economy." Frontiers in Public Health 8 (December 2020): 587046. https://doi.org/10.3389/fpubh.2020.587046.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

iii. Peraturan Perundang-Undangan

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Perpres Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.

Perpres Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional.

Perpres Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Makan Bergizi Gratis.

iv. Data Elektronik

Badan Pusat Statistik. *Persentase Penduduk Miskin Maret 2024 Turun Menjadi 9,03 Persen*. July 1, 2024. https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2024/07/01/2370/persentase-penduduk-miskin-maret-2024-turun-menjadi-9-03-persen-.html.

Janati, Firda, and Robertus Belarminus. "BGN Catat 1.528 SPPG Dihentikan Operasional Sementara per 25 Maret 2026." *Kompas.Com*, March 27, 2026. https://nasional.kompas.com/read/2026/03/27/12531371/bgn-catat-1528-sppg-dihentikan-operasional-sementara-per-25-maret-2026. Membership: https://kmp.im/plus6 Download aplikasi: https://kmp.im/app6.

Lestari, Ayu. "CISDI Kritik MBG: Anggaran Membengkak Tanpa Regulasi Dan Tata Kelola Yang Jelas." *NU Online*, January 27, 2026. https://nu.or.id/nasional/cisdi-kritik-mbg-anggaran-membengkak-tanpa-regulasi-dan-tata-kelola-yang-jelas-1yDCn.

Prasetyo, Devandra Abi. "10 Provinsi Dengan Angka Stunting Tertinggi, Didominasi Indonesia Tengah-Timur." *detikHealth*, June 5, 2025. https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-7949593/10-provinsi-dengan-angka-stunting-tertinggi-didominasi-indonesia-tengah-timur.

Sekretariat Wakil Presiden. *Prevalensi Stunting Indonesia Turun Ke 19,8%*. Jakarta Pusat: Kementerian Sekretariat Negara RI, 2025. https://stunting.go.id/prevalensi-stunting-indonesia-turun-ke-198/?btwaf=48736591.

Setuningsih, Novianti, and Adhyasta Dirgantara. "Bos BGN Sebut Penerima MBG Capai 41,6 Juta Orang, Ada 11.640 Orang Alami Keracunan." *Kompas.Com*, November 1, 2025.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

https://nasional.kompas.com/read/2025/11/12/22590541/bos-bgn-sebut-penerima-mbg-capai-416-juta-orang-ada-11640-orang-alami.

Shahibah. "10 Provinsi Dengan SPPG Terbanyak Juni 2026, Jawa Barat Di Puncak!" *GoodStats*, June 9, 2026. https://data.goodstats.id/statistic/10-provinsi-dengan-sppg-terbanyak-juni-2026-jawa-barat-di-puncak-xO1Qt.

Shokib, Muhammad. "Sentralisasi Berbalut Otonomi: Menelaah Kuasa Pemerintah Pusatdi Balik Program Makan Bergizi Gratis." *Pusat Konsultasi Dan Bantuan Hukum Uin Syech Nurjati Cirebon*, April 26, 2026. https://pkbh.uinssc.ac.id/sentralisasi-berbalut-otonomi-menelaah-kuasa-pemerintah-pusat-di-balik-program-makan-bergizi-gratis/.

Wildan, Muhammad. "Serapan Anggaran MBG Hampir Sentuh 60%." *ddtc news*, November 21, 2025. https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/1815371/serapan-anggaran-mbg-hampir-sentuh-60.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/